

**PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PNPM
MANDIRI DALAM PENDAPATAN KARTU KELUARGA MISKIN
(Studi Di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)**

Aris Tri Haryanto, Septiana Novita Dewi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta
Email: Arisharyanto26@yahoo.co.id

Abstract

Salah satu persoalan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran, sehingga untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program PNPM terhadap pendapatan kartu keluarga miskin di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Program PNPM adalah adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan produksi usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 95,5%. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 87%. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan penghasilan usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 65,5%.

Kata Kunci : PNPM, Pendapatan Kartu Keluarga Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti Indonesia. Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat kompleks, kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang terus bertambah, masalah gizi dan kesehatan masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh pemerintahan yang korup yang memiskinkan masyarakatnya.

Salah satu persoalan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi tidak berdaya karena terbatasnya kemampuan ekonomi sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit dikenali dan ditarik garis batas secara umum mengingat berbagai perbedaan yang melatar belakangi. Kemiskinan harus ditanggulangi, banyak teori ekonomi yang tersedia di lembaga perguruan tinggi dan riset, namun tidak semua teori itu bisa dijalankan atau dilaksanakan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas pemerintah seperti menyediakan lapangan pekerjaan, memberantas korupsi, menerapkan sistem ekonomi, menyediakan infrastruktur dan mengundang investor domestik maupun asing.

Perubahan cara berfikir dan cara bertindak pada ukuran kecil orang per orang atau keluarga bisa berkembang dan punya dampak pada penerapan kebijakan umum yang dilakukan pemerintah. Ukuran kemiskinan bukan garis kemiskinan atau upah minimum tetapi dari penghasilan yang diperoleh cukup untuk biaya makan, kebutuhan listrik, air, transportasi, biaya sekolah, menabung

dan membayar asuransi kesehatan, kendaraan dan jiwa dalam pengertian yang sederhana. Kalau kebutuhan sederhana tersebut belum mampu untuk membayarnya kita masih dalam situasi yang bisa mengancam kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri mulai merumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelestarian. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangann kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan pemukiman, sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal serta ekonomi, meliputi : penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dikelola di tingkat Kecamatan oleh lembaga Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).

Dukungan yang diberikan diantaranya adalah pemberian fasilitas kredit melalui bank dengan cara dan pprosedur yang mudah serta bunga rendah lewat Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). Kredit ini diberikan pada keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan ekonomi yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Program ini salah satunya adalah pemberian bantuan simpan pinjam kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Program-program PKPS-BBM yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai implikasi kenaikan harga BBM pada bulan oktober tahun 2005 yang meliputi program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai), raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin), Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin), dan program-program lainnya. Sedangkan program yang arahnya kepada pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Adapun program kebijakan PNPM itu sendiri ditetapkan pada tahun 2007 dan didefinisikan sebagai program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang sebelumnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Diharapkan PNPM mandiri mampu memberikan kontribusi besar dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Peran Program kebijakan PNPM mandiri terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari Menkokesra 2008, Pada tahun 2007 PNPM telah mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50 ribu desa/kelurahan. Tahun 2008, PNPM mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan. Selanjutnya di tahun 2009 ini secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan menjadi penerima manfaat PNPM ini.

Adapun tujuan umum dari PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

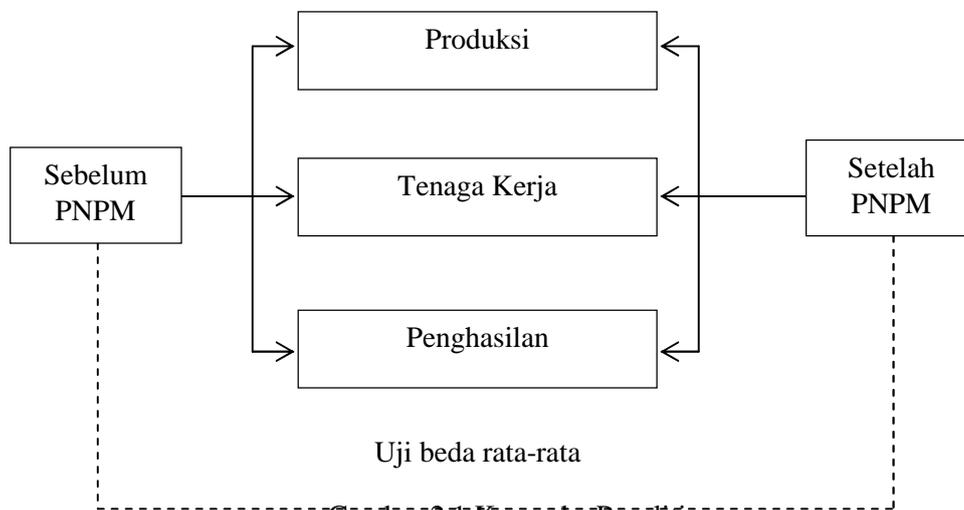
- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)

- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan

Salah satu tujuan dari PNPM mandiri adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga mereka. Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen yang sudah 4 tahun semua desa di kecamatan tersebut menerima bantuan simpan pinjam dari program PNPM Mandiri pedesaan. Kecamatan Sidoharjo juga merupakan kecamatan yang mempunyai karakteristik usaha masyarakatnya yang beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri pedesaan terhadap pendapatan pelaku usaha di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan Gambar 1.1 memperlihatkan (1) perbedaan rata-rata tingkat produksi sebelum dan setelah adanya PNPM-MP (2) perbedaan rata-rata penghasilan sebelum dan setelah adanya PNPM-MP dan (3) perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah adanya PNPM-MP.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

1. Diduga terdapat perbedaan rata-rata produksi sebelum dan sesudah program PNPM-MP meningkatkan produksi anggota UPPKS.
2. Diduga terdapat perbedaan rata-rata tenaga kerja sebelum dan sesudah program PNPM-MP meningkatkan jumlah tenaga kerja UPPKS.
3. Diduga terdapat perbedaan rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM-MP meningkatkan penghasilan anggota UPPKS.

Metode Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah 120 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima PNPM Kabupaten Sragen. Jumlah anggota kelompok UPPKS bervariasi antara 5 hingga 10 anggota. Jumlah keseluruhan anggota sebanyak 1.125 orang. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi kelompok yaitu 12 (10% x 120) kelompok, dengan masing-masing kelompok diambil 5 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 60 (12x5) responden.

Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi sampel atau obyek penelitian adalah 120 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima PNPM Kabupaten Sragen. Jumlah anggota kelompok UPPKS bervariasi antara 5 hingga 10 anggota. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi kelompok yaitu 12 (10% x 120) kelompok, dengan masing-masing kelompok diambil 5 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 60 (12 x 5) responden. Alasan pengambilan sampel ini sebesar 60 (12x5) responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *kuota sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Produksi

Produksi yang diukur adalah prosentasi kenaikan produksi dari sebelum penerimaan dana PNPM. Penggunaan presentase kenaikan karena satuan yang digunakan sebagai ukuran peningkatan produksi untuk tiap usaha adalah berbeda-beda. Hasil perhitungan prosentasi kenaikan produksi setelah penerimaan dana PNPM ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Prosentasi produksi setelah penerimaan dana PNPM

	Produksi Sebelum	Produksi Sesudah
Rata-rata produksi	124,12	195,05
Minimum	1	2
Maximum	500	850

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa rata-rata produksi usaha anggota kelompok UPPKS mengalami kenaikan 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PNPM jumlah produksi perbulan anggota kelompok UPPKS meningkat.

Penghasilan

Tabel 4.11 menunjukkan penghasilan tiap bulan anggota kelompok UPPKS sebelum adanya PNPM dan setelah PNPM. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dihitung kenaikan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp.1.125.833 (65,5%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PNPM penghasilan perbulan anggota kelompok UPPKS dapat meningkat.

Tabel 1.2. Penghasilan per bulan anggota sebelum dan setelah adanya PNPM (satuan rupiah)

	Hasil Sebelum	Hasil Sesudah
Rata-rata penghasilan	1.569.166,67	2.695.000
Minimum	400.000	200.000
Maximum	3.000.000	4.800.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Analisis Data

Untuk mengetahui dampak dari adanya program PNPM terhadap tenaga kerja, produksi dan penghasilan usaha, digunakan uji beda rata-rata. Hasil uji beda antara sebelum dengan setelah adanya PNPM ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Hasil Uji Beda Rata-Rata

Variabel	Rata-rata		Selisih	Presentase Kenaikan rata-rata	Uji Beda sebelum dengan setelah adanya PNPM		Kesimpulan
	Sebelum	Setelah			Z _{hitung}	Sig.	
Produksi	124,12	195,05	95,5	95,5	6,895	0,000	Signifikan
Tenaga Kerja	1,12	1,187	0,067	87	8,251	0,000	Signifikan
Hasil	1.569.167	2.695.000	1.125.833	65,5	16,195	0,000	Signifikan

Usaha							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan produksi pada usaha anggota kelompok UPPKS sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan produksi setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh $Z_{hitung} (6.895) > Z_{tabel} (2,003)$ atau nilai signifikannya $(0,000) < (0,05)$ dengan tingkat kepercayaan 95%.
2. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan jumlah tenaga kerja pada usaha anggota kelompok UPPKS sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan jumlah tenaga kerja setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai $Z_{hitung} (8.251) > Z_{tabel} (2,003)$ atau nilai signifikannya $(0,000) < (0,05)$ dengan tingkat kepercayaan 95%.
3. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan penghasilan perbulan usaha anggota kelompok UPPKS sebelum dengan sesudah adanya PNPM, dengan penghasilan perbulan setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditunjukkan oleh $Z_{hitung} (16.195) > Z_{tabel} (2,003)$ atau nilai signifikannya $(0,000) < (0,05)$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

Pembahasan

Hasil penelitian dalam penelitian ini berhubungan dengan profil anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen. Berdasarkan analisis deskriptif diatas ditemukan:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap 12 kelompok yang terdistribusi 8 (delapan) Desa, yaitu Banaran (7), Jetis Karangpung (8), Bukuran (9), Ngebung (9) Sambirembe (9), Karang Jati (8), Krikilan (5), Tegal Ombo (5).
2. Mayoritas anggota kelompok UPPKS yang memanfaatkan dana PNPM adalah perempuan.
3. Umur anggota kelompok didominasi 35-39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anggota kelompok berada pada usia dewasa.
4. Jumlah tanggungan keluarga anggota kelompok mayoritas 3 (tiga) orang, hal ini menunjukkan bahwa tanggungan keluarga tidak cukup berat.
5. Pendidikan yang dimiliki anggota kelompok mayoritas berpendidikan SLTP, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok masih sangat minimum.
6. Jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok mayoritas adalah pedagang, hal ini menunjukkan bahwa dana PNPM yang diterima anggota kelompok digunakan sebagai tambahan modal.
7. Besarnya dana PNPM yang diterima anggota kelompok antara Rp.500.000- Rp 2.000.000 dengan rata-rata Rp. 965.000.000.
8. Jumlah tenaga kerja anggota kelompok masih banyak yang menggunakan 1 (satu) orang sebagai tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan anggota kelompok merupakan usaha yang dikelola secara keluarga.
9. Peningkatan produksi yang dihasilkan anggota kelompok menunjukkan bahwa dana PNPM dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha.
10. Rata-rata penghasilan usaha anggota kelompok mengalami kenaikan sebesar 65,5% dari sebelum adanya PNPM sebesar Rp 1.569.167 menjadi Rp 2.695.000 setelah adanya PNPM.

Berdasarkan uji beda rata-rata antara sebelum dengan setelah adanya PNPM pada anggota kelompok UPPKS yang memanfaatkan dana PNPM didapatkan hasil sebagai berikut diantaranya terdapat perbedaan rata-rata produksi yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM. Berdasarkan hasil olah data dan tanda positif, menunjukkan bahwa produksi setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan produksi sebelum mendapatkan dana PNPM. Kedua terdapat perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM dengan peningkatan jumlah tenaga kerja rata-rata sebesar 0,067 (87%). Berdasarkan hasil penelitian dan tanda positif, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja sebelum mendapatkan

dana PNPM. Ketiga terdapat perbedaan rata-rata penghasilan perbulan yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM dengan peningkatan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.125.833 (65,5%). Berdasarkan hasil penelitian dan tanda positif, menunjukkan bahwa penghasilan perbulan setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan penghasilan perbulan sebelum mendapatkan dana PNPM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Profil anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM

- a. Profil anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah tanggungan keluarga anggota kelompok mayoritas 3 (tiga) orang, hal ini menunjukkan bahwa tanggungan keluarga tidak cukup berat.
 - 2) Pendidikan yang dimiliki anggota kelompok mayoritas berpendidikan SLTP, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok masih sangat minimum.
 - 3) Jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok mayoritas adalah pedagang, hal ini menunjukkan bahwa dana PNPM yang diterima anggota kelompok digunakan sebagai tambahan modal.
 - 4) Besarnya dana PNPM yang diterima anggota kelompok antara Rp 500.000- Rp 2.000.000 dengan rata-rata Rp. 965.000.000.
 - 5) Jumlah tenaga kerja anggota kelompok masih banyak yang menggunakan 1 (satu) orang sebagai tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan anggota kelompok merupakan usaha yang dikelola secara keluarga.
 - 6) Peningkatan produksi yang dihasilkan anggota kelompok menunjukkan bahwa dana PNPM dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha.
 - 7) Rata-rata penghasilan usaha anggota kelompok mengalami kenaikan sebesar 65,5% dari sebelum adanya PNPM sebesar Rp 1.569.167 menjadi Rp 2.695.000 setelah adanya PNPM.
- b. Anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM di Kabupaten Sragen, memanfaatkan dana PNPM untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, produksi dan penghasilan.

2. Dampak Program PNPM

- a. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan produksi usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 95,5%.
- b. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 87%.
- c. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan penghasilan usaha anggota kelompok UPPKS sebesar 65,5%.

Saran

1. Saran Manajerial

Dampak yang positif adanya PNPM di Kabupaten Sragen, menunjukkan program ini cukup berhasil dalam hal:

- a. Meningkatnya pendapatan anggota kelompok UPPKS dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak.
- c. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya

administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

2. Saran penelitian Kedepan

Untuk penelitian kedepan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini antara lain:

- a. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima dana PNPM adalah perempuan. Penelitian kedepan hendaknya perlu memfokuskan pada peran perempuan dalam memanfaatkan dana PNPM.
- b. Beberapa variabel dalam penelitian ini belum dilakukan uji statistik yang lebih mendalam seperti faktor-faktor demografi. Penelitian kedepan dapat memasukkan faktor-faktor demografi sebagai variabel independen seperti umur dan pendidikan, hal ini berkaitan dengan masa produksi dan kemampuan memutuskan permasalahan seseorang dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka, (2001), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Aisyiah, Siti Tri Rahayu, (2001), Potret Kemiskinan dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Surakarta FE UMS, Vol 2 (8), 62 – 84.
- Alfian, (1980), *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIS, Jakarta
- Arikunto Suharsimi, (2000), *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta Basu, Parikshit K, (2007), Critical evaluation of growth strategies : India and China, *Internasional journal of sosial economics*, Vol.34 No.9, pp. 664-678
- Baswir, Revisond. (1999), *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Penemuan Hal Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*. IDEA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bayo, Adree Bayo, (1996), *Kemiskinan dan Strategi memerangi kemiskinan*, Yogyakarta, Liberty
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/ Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta: BPS Buku Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa , (1995)
- Dahlan, Alwi, (1980), *Jaringan Komunikasi Sosial di Pedesaan sebagai Saluran Pemerataan Informasi*. Jakarta.
- Etsioni, (1999), Privacy is a Societal License Firdausy,
- Carunia Mulya, (1997), Effects of the subsidy removal of fertilizer on rural poverty in north Sulawesi, Indonesia, *International Journal of Social Economics*, Vol. 24 No. 1/2/3, pp. 207-222
- Fred W. Riggs (1998), *Administrasi Pembangunan*, Rajawali: Jakarta.
- Girvan, (2004), *Pemberdayaan*, Jakarta
- Ife, Jim, (1995) *Community development creating community alternatives*, Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia
- Ismawan, (2003), *Pengusaha Mikro dan Permodalan*, Jakarta
- Jogiyanto, (2008), *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, (2000), *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN
- Latief, M Syahbudin dan Suryatiningsih, (1994), *Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, dalam Mubyarto, dkk, 1994,
- Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, (1998), *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Aditya Media.
- Nicholson, (1992), *Kesejahteraan Sosial*, Grasindo, Jakarta
- Prijono, Onny S, (1996), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta CSIS (Centre for strategic and International Studies).
- Prijono, Onny S., (1993) *Buku Panduan PNPM*, Jakarta, Depdagri dan Bappenas.
- Prijono, Onny S, (1995) *Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan*

- Desa Tahun 1995/1996, Semarang, Kantor PMD Jawa Tengah____, (1996), *Buku Panduan Pengembangan KS*, Jakarta,
- Kantor BKKBN____, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*, PT Gramedia, Jakarta
- Priyono dan Pranaka, (1996), *Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan*, Gramedia, Jakarta
- Sadono Sukirno, (1994), *Makroekonomi*, Grafindo Jakarta
- Salim, Emil, (1984), *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Inti Idayu Press, Jakarta
- Sen, (2002), *Welfare Economics*
- Sudjana, (2002), *Metode Statistika*, Bandung,
- Tarsito. Singarimbun, Masri, (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP 3 ES
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS____, “*Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues*” (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia:
- Suharto dkk,(2004), *Dimensi Kemiskinan*, SMERU
- Swasono, (2004 : 111-119), *Kriteria Kemampuan*
- Tim PNPM-MP, (2006), *Manual Proyek P2KP*, Buku Satu : *Pedoman Umum*,
- Badan KB PMD Kab.Sragen, UPK PNPM-MP Kec.Sidoarjo Kab.Sragen
- Ullah, A.K.M. Ahsan dan Jayanto K. Routray, (2007), *Rural Poverty alleviation through NGO intervention in Bangladesh : how far is the achievement?*, *International Journal of Social Economics*, Vol. 34 No. 4, pp. 237-248